

Daftar Pustaka

Buku

- Ismi, K. M. (2018). Review Buku Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat. *Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 4(1), 9. (BUKU)
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, cetakan ke (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2003).
- Krisnawati Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Bandung :CV. Utomo, 2005)
- Muhammad Fu'ad Syakit, Perkawinan Terlarang (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002).
- Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Sinar Grafika, 2013), hlm. 153.
- Pedoman Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2021.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka Jakarta. Hlm. 538.
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Satria Efendi M, Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:Kencana, 2004)
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Peraturan Perundang-Undangan

- Inpres No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 Tentang
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang
 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam

Website

<http://www.pa-sukoharjo.go.id/biayapanjar.html> *Konflik Pasangan Suami Istri*
 diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

Jurnal

Azizah, S. Z. (2017). *Pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama: Studi kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Iqbal, M (2020). PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic ...*, 103.88.229.8, <http://103.88.229.8/index.php/ElIzdiwaj/article/view/8489>

Nur Fauziah, Luluk. Cikusin, Yaqub. Khoiron (2021) EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*. Vol 15, No 4

Nagara, B (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, ejournal.unsrat.ac.id, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/14110>

Ismi, K. M. (2018). Review Buku Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat. *Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 4(1), 9.

Pariwisata, A. G. (2019). Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligimai Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 4(2), 338-353

Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445-461.

Yulia, Hukum Perdata (Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2015), hlm. 32

- P.M. Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 67; J. Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006, hlm.272; dan L.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.189.
- Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13
- Nana Sudjana dan Ibrahim. 2009. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Algensindo. h. 64
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Pertama. Malang: Bayu Media. hal. 248
- Surahmad, W. (1989). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar MetodaTehnik*, Bandung: Tarsito.
- Putri, P. Y., Djatmika, P., & Puspitawati, D. (2018). *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015*. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 95-117.
- Azizah, S. Z. (2017). *Pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama: Studi kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118.
- Sugiswati, B. (2014). Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- Dumbela, S. M. Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA. JK)
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168.

ANGGRAENI, Y., Santoso Subari, A., & Turatmiyah, S. (2018). *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SKRIPSI* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Alfaruqi, D. (2019). *Pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam dan implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan perspektif keadilan jender* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).

HUSNA, W. A. (2018). *ANALISA HUKUM AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 134

Iskandar, Y. (2020). *TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

RISANTO, F. M. F. *PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.*

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

Hidayati, Lili (2021) Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *KHULUQIYYA*, Vol 3 No 1

Awaliyah, Robiah. Darmalaksana, Wahyudin (2021) Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*. Vol 3. No 2

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm 81-83

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 141

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979) hlm. 46

- Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981),
 hlm. 54
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta:
 Sinar Grafik, 2003, Cetakan ke-2, hal. 207
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih
 Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal. 231
- Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis
 Kritis
 terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. *Al-'Adalah*, (2014).12(1),
 hal 191–204.
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar
 Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194-209.
- Karma, I. P. W., & Artadi, I. K. Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa
 di Luar Pengadilan Dalam Sengketa Hak Kekayaan
- Samsudin, D. (2019). *PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
 KELUARGA (LK3) MITRA SEJAHTERA DALAM UPAYA
 PENCEGAHAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA MANNA* (Doctoral
 dissertation, IAIN BENGKULU).
- Handayani, F., & Syaflidar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian
 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227-
 250.
- Handayani, F., & Syaflidar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian
 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227-
 250.
- Sundalangi, B. K. (2021). TINJAUAN PERDATA PENYELESAIAN
 SENGKETA WARISAN DALAM STUDI KASUS YANG TERJADI DI
 KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA (DESA
 KAWENG). *LEX CRIMEN*, 10(10).
- Manurung, D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat
 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Borneo Law Review Journal*, 3(1),
 73-95.

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Mutiara, J., & Manurung, S. A. (2021, April). Penyusunan Legal Review Di Kantor Hukum Indra Raharja & Partners Lawyers. In *ConCEPT-Conference on Community Engagement Project* (Vol. 1, No. 1, pp. 222-231).
- Kurniawan, M., & Nainggolan, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM KLIEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.
- Wulandari, M. (2019). Syarat Formil dan Materil Pemberian Surat Kuasa Khusus Dalam Perkara Perdata. *Varia Hukum*, 24(30), 1-2.
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.